

Comparative Analysis of President Soeharto and Kim Dae Jung's Policies in Overcoming the 1997 Economic Crisis based on Small Theory and Idiosyncratic Theory

Analisis Perbandingan Kebijakan Presiden Soeharto dan Kim Dae Jung dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997 berdasarkan Small Theory dan Teori Idiosinkratik

Putri Jasmine Surapati¹ Nada Nur Maulidina² Fayza Maritza Putri Agustono³ Hilda Ferira⁴

¹⁻⁴UPN Veteran Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

*Corresponding Author E-mail: jasminesurapati@upnvj.ac.id

Abstract

The 1997 economic crisis was a situation in which the Asian economy experienced a drastic decline which was triggered by Thai finance. At that time Thailand, burdened by huge foreign debt, decided to develop the Baht currency after attacks by currency speculators on the country's foreign reserves. This monetary shift was aimed at stimulating export earnings but this strategy actually had a bad impact. This has had the effect of transmitting to several countries in other Asian regions, such as South Korea and Indonesia. In responding to the formulation of this phenomenon, South Korea and Indonesia have their own policies to overcome the 1997 Economic Crisis. Thus, in order to understand the decision-making process in foreign policy, a level of analysis is needed, namely using idiosyncratic theory and small theory. Using a qualitative approach, this research generates ideas to understand the background to the policy process it created to address the issue of the 1997 Economic Crisis.

Keywords: Economic Crisis, South Korea, Indonesia, Level of Analysis

Abstrak

Krisis Ekonomi 1997 merupakan sebuah keadaan dimana perekonomian Asia mengalami penurunan secara drastis yang dipicu oleh keuangan Thailand. Saat itu Thailand terbebani akan utang luar negeri yang sangat besar, memutuskan untuk mengembangkan mata uang Baht setelah serangan yang dilakukan para spekulasi mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor akan tetapi justru strategi ini malah membawa dampak yang buruk. Hal ini menimbulkan efek penularan ke beberapa negara di Kawasan Asia lainnya, seperti Korea Selatan dan Indonesia. Dalam merespon perumusan fenomena tersebut, Korea Selatan dan Indonesia memiliki kebijakan tersendiri untuk mengatasi Krisis Ekonomi 1997. Dengan demikian, untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri, dibutuhkan level of analysis, yaitu menggunakan Teori Idiosinkratik dan Small Theory. Menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian ini menghasilkan pemikiran untuk memahami latar belakang proses kebijakan yang diciptakannya guna mengatasi isu Krisis Ekonomi 1997.

Kata kunci: Krisis Ekonomi, Korea Selatan, Indonesia, Level Analisa

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi dapat diartikan sebagai suatu keadaan disaat Rakyatnya sudah tidak mempercayai lagi Pemerintahan dari sebuah Negara, terutama dalam masalah finansial (Siswosoemarto, 2013). Krisis ekonomi akan berdampak luas apa bila salah satu negara maju mengalami gangguan ekonomi dan

* Copyright (c) 2021 **Putri Jasmine Surapati et.al**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Diterima: 7 Februari , 2021; Revisi: 18 Februari, 2021; Disetujui: 21 Maret, 2021

dampak yang terjadi secara meluas dinamakan krisis ekonomi global (Sari & Fakhrudin, 2016). Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, memberikan dampak yang besar pada negara-negara Asia yang sedang berkembang. Hal ini berdampak pada terganggunya ekonomi di negara Kawasan Asia karena kehilangan investor asing - yang telah menanamkan uang mereka di '*Asian Economic Miracle Countries*' sejak lama sebelum 1997 (Lindblad, 2015).

Mengenai Krisis Ekonomi ini berdampak pada beberapa negara seperti halnya di Indonesia dan Korea Selatan. Ketika terjadinya Krisis Ekonomi, hal utama yang menyebabkan krisis ini dikarenakan bunga yang harus dibayarkan tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan negara akibat terganggu dari krisis ekonomi (Sari & Fakhrudin, 2016). Di Korea Selatan sendiri pada saat mengalami krisis ekonomi sedang dipimpin oleh Kim Dae Jung yang baru saja menjabat sebagai Presiden Korea Selatan ia menggantikan Presiden Kim Young Sam pada tahun 1998 (Kim & Lee, 2011). Pada mulanya Krisis Ekonomi di Korea Selatan terjadi pada November 1997 setelah krisis yang terjadi di Thailand pada Juli 1997. Yang kemudian dialami pada korea melihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 5 persen pada 1997 menjadi 6,7 persen pada 1998, hal ini juga berpengaruh pada tingkat pengangguran yang meningkat dari 2,6 persen menjadi 6,8 persen, bahkan mencapai di angka 8 persen (Shin, 2013). Krisis ekonomi yang dialami oleh kedua negara Asia ini, dapat dikatakan sangatlah berbeda terkait penanganan dan pembuatan kebijakan yang dibuat oleh kedua pemimpin negara ini pada saat itu. Selain dari pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbeda, melihat dari latar belakang dan gaya kepemimpinan antara presiden Soeharto dan Presiden Kim Dae jung pun memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Terutama pada cara dan penanganan kedua pemimpin dari kedua negara ini dalam mengatasi krisis ekonomi yang berdampak pada beberapa negara di Asia yang terjadi di tahun 1997.

Mengenai kasus ini tentu saja sangatlah menarik untuk dibahas melihat dari perbedaan penanganan antara kedua pemimpin di negara yang berbeda yang sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatasi krisis ekonomi di negaranya. Namun, belum ada penelitian mengenai perbandingan kedua pemimpin yang memiliki karakter kuat dan memiliki pandangan yang berbeda dalam mengelola ekonomi negara pad krisi ekonomi asia 1997, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini lebih banyak meneliti pada kajian – kajian proses implementasi kebijakan (Iriansyah, 2020; Kaloka et al., 2019; Minardi, 2019; Utami, 2018). Pada penelitian ini kami akan membahas mengenai Pengertian Krisis Ekonomi dan Implikasinya dalam Lingkup Regional Maupun Internasional, selain itu Bagaimana pengaruh kepribadian kedua pemimpin yakni Presiden Soeharto dan Presiden Kim Dae Jung melihat dari teori Idiosinkratik dan Small Theory terutama dalam hal pembuatan kebijakan untuk mengatasi krisis moneter di negaranya, dan Kelebihan dan Kekurangan atas kebijakan yang diambil oleh masing-masing pemimpin serta mengenai keberhasilannya dalam penerapan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam menganalisa terkait dengan perbandingan kebijakan presiden soeharto di indonesia dan kim dae jung di korea selatan dalam mengatasi krisis ekonomi 1997 yang berdasarkan pada small theory dan teori idiosinkratik melalui cara penggabungan kedua jenis penelitian yang berbeda yakni jenis penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Creswell mendefinisikan bahwa metode penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian dengan menggabungkan kedua jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Kim & Lee, 2011). Pada penelitian kebijakan ini menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Yang dimana penggunaan teknik kualitatif digunakan saat studi pendahuluan, landasan teori maupun dalam segi pembahasan. Terkait Teknik

Kuantitatif digunakan pada pendahuluan dan pembahasan, melihat banyaknya data-data yang tidak cukup jika hanya dijelaskan melalui Teknik kualitatif. Data yang diperoleh melalui berbagai situs dan jurnal pun merupakan data yang berbentuk kualitatif dan kuantitatif yang didapatkan melalui beberapa sumber.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Small Theory merupakan teori yang berada di level mikro dan dapat diaplikasikan secara konseptual. Hudson & Day (2019), evolusi proses pembuatan kebijakan luar negeri memiliki perhatian tersendiri, salah satunya adalah pada level pembuatan keputusan pemimpin negara. Krisis Ekonomi 1997 merupakan suatu fenomena ekonomi politik di Asia yang fantastis, terutama di Korea Selatan dan Indonesia. Dalam disertasi berjudul “Demokratisasi Krisis 1997”, Kim Dae Jung (pemerintahan Korea Selatan) menggunakan restrukturisasi sistem (*Chaebol*) – promosi fleksibilitas pasar sumber daya manusia, liberalisasi pasar domestic, dan daya tarik bagi investasi. Sedangkan Soeharto (pemerintahan Indonesia) menerapkan sistem patronase dan program reformasi struktural dalam menangani Krisis Ekonomi 1997. Dengan demikian, untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri, dibutuhkan *level of analysis* sehingga implikasi suatu rumusan dapat menjadi lebih dipahami. Variable teori tersebut mencakup nilai-nilai pengalaman dan karakteristik yang dipengaruhi oleh persepsi, kalkulasi, dan pilihan lainnya atau teori tersebut berkaitan dengan psikologis dan prediksi (Rosenau, 2006). Kegiatan tersebut sama hal dengannya *Elite Perception*. David Barber menggambarkan sebuah tipologi karakter kepala negara dengan tujuan untuk memahami pola *psychobiography* dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 . Tipologi Karakter Kepala Negara

<i>Berapa Banyak Energi yang Diinvestasikan Seorang Presiden?</i>		
	<i>Positif</i>	<i>Negatif</i>
<i>Aktif</i>	Harga diri tinggi, sangat ingin mencapai hasil, mengarahkan banyak energi ke arah pencapaian, terbuka terhadap ide-ide baru, fleksibel, dan mampu belajar dari kesalahan.	Bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, ambisius, kurang manajemen emosi, dan agresif.
<i>Pasif</i>	Individu, cenderung kurang terlibat secara pribadi dalam perumusan dan pembuatan kebijakan	Harga diri rendah, kurangnya pengalaman dan fleksibilitas, prinsip yang tidak jelas, dan tipe yang menarik diri.

Sumber: Cottam *et al* (Cottam et al., 2010)

Karakter individu merupakan sumber penting bagi kepala negara untuk mengambil keputusan kebijakannya. Menurut Preston, pengambilan keputusan kebijakan luar negeri selalu berdasarkan karakter, kemampuan (pengalaman), dan sensitivitas terhadap konteks. Dengan berfokus pada teori Idiosinkratik, Kim Dae Jung dan Soeharto memiliki perbedaan signifikan dalam pengambilan keputusan kebijakan fenomena Krisis Ekonomi 1997. Teori Idiosinkratik juga mampu memberikan penjelasan mengapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan lebih cepat menyelesaikan Krisis Ekonomi 1997 dibandingkan Indonesia. Dalam buku *Understanding Foreign Policy Decision Making* karya (Mintz & DeRouen Jr (2010), menjabarkan tiga indikator model analisa Idiosinkratik, antara lain:

Kepribadian Pemimpin (*Leader's Personality*)

Menyatakan bahwa kepribadian seseorang merupakan integrasi teknik yang berpola regulasi emosional, persepsi, penilaian, dan tujuan. Kepribadian seseorang dapat diukur melalui tingkat energi, neurosis, gender, ras, budaya, etnis, dan motif lainnya (Skeem et al., 2011).

Gaya Kepemimpinan (*Leadership Style*)

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu ukuran analisa mengapa tindakan alternatif seorang pemimpin yang digunakan. Alex Mintz (Mintz & DeRouen Jr, 2010) menjabarkan berbagai macam gaya kepemimpinan, yaitu:

1. **Goal Driven vs Context Driven**, Goal Driven merupakan gaya yang cenderung menentang kendala yang akan dihadapinya dalam mengambil sebuah keputusan. Gaya tersebut memperlihatkan gaya pemimpin yang tidak peduli dengan situasi yang long-term dan tidak transparansi terhadap informasi baru. Sedangkan Context Driven merupakan keterbalikan dari gaya Goal Driven, yaitu selalu memperhatikan situasi jangka panjang dengan keaktifan dalam mencari informasi baru.
2. **Task Oriented vs Context Oriented Task Oriented**, merupakan gaya kepemimpinan yang keras dan pasti terhadap ideology mereka. Sedangkan Context Oriented merupakan gaya kepemimpinan yang kurang memperhatikan hingga membutuhkan koalisi internasional atau domestic secara luas sebelum mengambil tindakan.

Tipe Pemimpin (*Leadership Type*)

Setiap individu memiliki tipe yang berbeda. Perbedaan tipe mampu melahirkan kualitas kebijakan yang berbeda. Alex Mintz menjabarkan pula tipe-tipe pemimpin di dunia, yakni:

1. **Crusader**, Merupakan salah satu tipe pemimpin yang tertutup akan informasi baru dan menantang adanya batasan politik. Tipe crusader memiliki 2 jenis, yaitu: expansionist dan evangelist. Expansionist merupakan tipe pemimpin yang memiliki keinginan besar dalam control kekuasaan dan memiliki kemampuan rendah dalam memilih alternatif solusi. Sedangkan evangelist cenderung membawa hubungan yang nyaman dan berpengaruh dalam solusi.
2. **Strategic**, Merupakan salah satu tipe pemimpin yang memahami keinginannya dalam mencari informasi guna mencapai tujuan tersendiri. Pemimpin yang memiliki tipe strategic memiliki keberanian namun tetap berhati-hati dalam mewujudkan suatu keputusan (penuh pertimbangan).
3. **Pragmatic**, Merupakan tipe pemimpin yang memiliki jiwa menghargai yang tinggi dalam situasi yang sedang dihadapi. Namun tipe ini memiliki kekurangan dengan adanya informasi.
4. **Directive dan Consultative**, Merupakan tipe pemimpin yang mampu berfokus pada suatu isu ketika dihadapkan secara langsung dengan tantangan politik serta berhati-hati dalam melacak posisi elit lainnya.
5. **Reactive dan Accommodative**, Merupakan tipe pemimpin yang cenderung termotivasi bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Motif ini dilakukan secara konstituensi agar sesuai dengan pertimbangan pilihan yang mampu memenuhi syarat politik. Selain bijaksana, tipe tersebut juga memiliki sikap bridge-builders dimana mereka akan selalu mencoba berusaha dalam menciptakan consensus, meningkatkan akuntabilitas, dan reputasi.

6. **Incremental**, Merupakan salah satu tipe yang mempunyai jiwa menantang dalam suatu masalah dan memiliki transparansi dan terbuka dalam informasi.
7. **Charismatic**, Merupakan tipe yang menciptakan hubungan terbuka dalam informasi juga memiliki motivasi untuk mendorong orang lain agar dapat bertindak dalam kendala-kendala yang menantang.

Krisis Ekonomi di Indonesia pada tahun 1997

Krisis ekonomi merupakan sebuah keadaan dimana kondisi perekonomian suatu negara mengalami penurunan secara drastis yang biasanya dipicu oleh kondisi fundamental negara yang rapuh, seperti terjadi inflasi yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berjalan dengan lancar. Negara bisa mengalami sebuah krisis ekonomi dikarenakan tidak adanya kemampuan untuk membayar beban utang luar negeri karena beban utang tersebut melebihi kemampuan membayar negara, adanya neraca pembayaran dengan jumlah yang besar dan kondisinya tidak terkontrol serta investasi yang tidak efisien. Krisis ekonomi merupakan suatu keadaan dimana adanya rasa tergemuk di suatu negara pada sistem yang menjadi penyebab terjadinya depresiasi di negara tersebut tepatnya depresiasi pada perangkat perekonomian, yang mencakup nilai aset ataupun harga (CNN Indonesia, 2020).

Tahun 1997 merupakan tahun yang kelam bagi sebagian negara di Asia. Pada tahun 1997 sebagian negara di Asia mengalami sebuah krisis ekonomi tepatnya pada tanggal 2 Juli yang bermula dari Thailand yang mempunyai beban utang luar negeri yang sangat besar lalu memutuskan untuk mengambang mata uangnya yaitu Baht. Thailand mengamankan cadangan devisanya dari spekulasi mata uang dan membangkitkan pendapatan di bidang ekspor dengan cara mengambang mata uangnya, yaitu Baht (MacIntyre, 2018). Tindakan yang diambil dan dilakukan oleh pemerintah Thailand tersebut tidak berjalan dengan baik dan mengalami kegagalan, hal ini pun memberikan dampak terhadap perekonomian di negara Asia.

Banyak negara yang mengalami dampak besar terutama negara yang terletak di Asia Tenggara serta negara di Asia yang tergabung di dalam Asian Economic Miracle Countries (Pirie, 2012; Stubbs, 2017). Negara – negara tersebut di antaranya adalah Thailand, Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia. Saat krisis ekonomi ini terjadi, banyak pihak yang memprediksi bahwa kondisi dan stabilitas perekonomian Indonesia akan tetap stabil, aman dan baik – baik saja serta tidak akan bernasib sama dengan negara – negara lainnya di Asia yang dilanda krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan sudah ada penggambaran akan kondisi perekonomian Indonesia pada tahun sebelum krisis ekonomi terjadi sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Tetapi prediksi tersebut salah, Indonesia juga turut terkena dampak krisis ekonomi tersebut dan mengalami krisis ekonomi yang mempunyai imbas sangat besar terhadap kondisi dan stabilitas perekonomian Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang merasakan efek dari krisis ekonomi Asia 1997. Indonesia merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara dan sekaligus tergabung di dalam Asian Economic Miracle Countries. Keadaan perekonomian Indonesia pada tahun 1996 sedang berada di puncak perekonomian dimana indikator kemakmuran seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, laju inflasi yang baik dan terkendali, berkurangnya kemiskinan, dan meningkatnya cadangan devisa. Pada tahun 1997, Indonesia mulai merasakan dampak atas Krisis Asia. Ketidakstabilan nilai mata uang yang terjadi di Asia Tenggara menyebabkan adanya penarikan dana oleh para manajer keuangan internasional. Depresiasi yang sangat besar terhadap rupiah terjadi pada Juli hingga Desember 1997. Kajian Bank Dunia “Indonesia in Crisis, A Macroeconomic Update” yang terbit pada Juli 1998 menjelaskan bahwa terdapat kemerosotan nilai rupiah terhadap dolar AS pada bulan Juli sebesar 10,7%, bulan Agustus sebesar 25,7%,

bulan September sebesar 39,8%, bulan Oktober dan November sebesar 55,6% dan bulan Desember sebesar 109,6%.

Diskusi

Kebijakan Soeharto dalam menangani krisis moneter pada tahun 1997

Pada saat krisis terjadi, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi, yaitu kebijakan untuk melakukan penghematan devisa, BI mengurangi pembelian dollar AS, proyek – proyek besar ditunda, dan suku bunga BI dinaikkan (Desmiza, 2015). Rencana tersebut membuat biaya modal semakin meningkat dan mahal, lalu Indonesia terpaksa mengandalkan bantuan dari IMF. Dikarenakan hal ini, rezim Orde Baru dianggap takluk oleh gejolak perekonomian yang telah terjadi. Bantuan yang dipinjam sebesar 23,53 miliar dollar AS. IMF menyarankan 4 program untuk reformasi ekonomi, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, penyesuaian struktural, dan penyehatan sektor keuangan. IMF memberikan saran kepada Indonesia untuk melakukan sebuah restrukturisasi dalam sektor keuangan yang dilakukan melalui program restrukturisasi bank serta Indonesia disarankan untuk melakukan pengawasan dan memperkuat aspek hukum untuk perbankan (Adiyudha, 2020).

Berdasarkan teori idiosinkratik, Presiden Soeharto dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter. Presiden Soeharto dalam gaya kepemimpinannya mengedepankan pembangunan dan stabilitas negara. Keadaan hidup Presiden Soeharto saat masih kecil ialah prihatin. Hal ini lah yang membuat Presiden Soeharto memiliki kepribadian yang unggul. Presiden Soeharto selalu ramah, tersenyum dan bersikap ramah baik kepada kawan maupun lawan. Presiden Soeharto menganut 3 prinsip dalam hidupnya yaitu aja gumunan (jangan suka keheranan), aja kagetan (jangan suka terkejut), dan aja dumeh (jangan mentang – mentang). Berkat prinsip yang dianut oleh Presiden Soeharto ini, saat masa kepemimpinannya Indonesia disegani oleh negara asing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Kepribadian Presiden Soeharto ini membuat ia disegani oleh banyak orang. Presiden Soeharto tidak banyak bicara tetap disegani dan Indonesia juga ikut disegani. Dalam mengambil keputusan untuk menangani krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Presiden Soeharto tetap teguh dengan prinsip dan kepribadiannya sehingga saat diminta mundur dari jabatan kursi presiden pun akibat krisis ekonomi yang semakin parah serta tuntutan dan desakan dari masyarakat, ia bersedia mundur karena memang rakyat sudah tidak menghendaki serta tidak akan menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan kedudukannya.

Jika mengacu pada Small Theory, Presiden Soeharto merupakan pemimpin yang dalam proses kebijakannya menganut dua model. Dua model tersebut yaitu aktif – positif dan aktif – negatif. Presiden Soeharto merupakan pemimpin yang aktif dalam membuat kebijakan dan menanggulangi serta menyelesaikan permasalahan yang ada. Presiden Soeharto memiliki dua sisi dalam keaktifan tindakannya, yaitu positif dan negatif. Dalam menangani krisis ekonomi di Indonesia yang terjadi akibat dari dampak krisis Asia, Presiden Soeharto cenderung lebih aktif – negatif. Hal ini dikarenakan walaupun sistem perbankan dan perekonomian di Indonesia diperbaiki, krisis ekonomi yang melanda Indonesia akan tetap meluas karena akar permasalahan dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 – 1998 bukan hanya pada sektor perbankan. Hal ini dikarenakan pada saat itu negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi tetapi menganut sistem otoritarian. Presiden Soeharto juga memanfaatkan kondisi perekonomian Indonesia untuk melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Di tengah krisis ekonomi yang melanda di Indonesia, Presiden Soeharto memecat Gubernur Bank Indonesia yaitu

Soedradjad Djiwandono. Sampai sekarang belum ada alasan jelas mengapa Soedradjad Djiwandono dipecat. Hal ini kemudian yang menyebabkan rezim dan kepemimpinan Presiden Soeharto lengser. Presiden Soeharto lalu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia atas desakan dan tuntutan dari masyarakat. Kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian digantikan dan dilanjutkan oleh Wakil Presidennya yaitu B.J. Habibie.

Krisis ekonomi pada tahun 1997 – 1998 yang melanda Indonesia sangat memberikan dampak yang kurang baik. Dampak dari krisis ekonomi ini yaitu PHK, harga barang mengalami kenaikan, utang luar negeri meningkat, investasi menurun, biaya sekolah keluar negeri menjadi mahal, harga bbm naik, dan sebagainya. Angka kemiskinan jumlahnya mengalami peningkatan akibat krisis ekonomi ini. Diperkirakan pada Oktober 1998 angka kemiskinan menjadi 7,5 juta. Hal ini diakibatkan banyaknya PHK dan inflasi tinggi.

Kebijakan Kim Dae jung dalam Krisis Moneter tahun 1997 di Korea Selatan

Selain Indonesia, beberapa negara lainnya juga ikut serta merasakan efek dari adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 tersebut. Salah satu dari beberapa negara tersebut adalah negara Korea Selatan. Saat terjadi krisis moneter tahun 1997 tersebut, Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mendapatkan pinjaman dana dari *International Monetary Fund* (IMF). Pinjaman yang diterima IMF kepada Korea Selatan tersebut sebesar US\$40 miliar. Meskipun Korea Selatan merupakan negara yang mandiri, akan tetapi krisis moneter tersebut berakibat pada kemunduran ekonomi yang cukup signifikan. Seperti yang dapat kita dijadikan contoh yaitu ketika perusahaan otomotif KIA Motors mengalami jatuhnya pasar saham dan mengalami kerugian yang besar. Hal tersebut mendorong Korea Selatan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pasar, finansial, dan perdagangan. Maka dari itu, keberadaan serta peran IMF tersebut dinilai sangat membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis moneter di Asia. Hal itulah yang ditandai dengan bangkitnya perekonomian Korea Selatan yang lebih cepat dari negara-negara Asia lainnya (Kaloka et al., 2019).

Korea Selatan saat krisis ekonomi tersebut, sedang dalam pemerintahan Kim Dae Jung mengambil kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1997 dengan merestrukturisasi kondisi perekonomian Korea Selatan, yang dimana selain menggunakan bantuan dana dari IMF, juga menggunakan dana dari *World Bank* serta negara-negara maju lainnya, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Kebijakan selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan Kim Dae Jung yaitu meminimalisir intervensi pemerintah terhadap pasar, melalui deregulasi ekonomi, privatisasi ekonomi, serta liberalisasi pasar modal melalui serangkaian kebijakan restrukturisasi dan reformasi di sektor korporasi, finansial, tenaga kerja dan publik, yang dimana serangkaian kebijakan tersebut menimbulkan implikasi terhadap pergeseran pola *state oriented* menjadi pola *market oriented* (NI'MAH & Winarno, 2007).

Berdasarkan teori idiosinkratik, gaya kepemimpinan pemerintahan Kim Dae Jung sangat dikenal sebagai tokoh besar Korea Selatan yang memperjuangkan demokrasi. Sehingga, sebagai mantan anggota parlemen pro-demokrasi, Kim Dae Jung terkenal dengan reputasinya sebagai pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Bahkan di USA, Kim Dae Jung mendirikan *The Korean Institute for Human Right*. Kegigihan pemerintahan Kim Dae Jung dalam memperjuangkan demokratisme tersebut, berhasil membawanya untuk mendapatkan julukan Indingcho (Si Rambut Teki) yang tahan banting (Merdeka.com, 2020).

Kim Dae Jung sebagai presiden baru Korea Selatan tahun 1998, dikenal sebagai sosok yang memiliki reputasi sangat baik di luar negeri terutama di Jepang dan Amerika Serikat yang disebabkan pro terhadap demokrasi dan beberapa kebijakan yang anti otoriter (Hidayati, 2015). Sehingga dilihat dari gaya

kepemimpinannya yang demokrasi tersebut, dalam menangani krisis ekonomi itu yang telah dijelaskan bahwa Korea Selatan menerapkan *market oriented*, pasca krisis ekonomi 1997 pemerintahan Kim Dae Jung masih tetap mempertahankan *model development state*, sebab pada kenyataannya *model development state* masih memiliki sisi positif dalam pembangunan perekonomian Korea Selatan, hanya saja perlu dilakukan sedikit perubahan terhadap peran negara yang lebih transparan dan demokratis untuk memulihkan perekonomian nasionalnya (NI'MAH & Winarno, 2007). Kim Dae Jung juga berpendapat bahwa intervensi yang berlebihan dalam perekonomian telah mengakibatkan kesulitan ekonomi (Kaloka et al., 2019).

Jika ditinjau dari *small theory*, pemerintahan Kim Dae Jung menganut model aktif-positif dalam menangani krisis ekonomi tahun 1997 yang dimana pemerintah Kim Dae Jung berusaha membedakan dirinya dengan pemerintahan sebelumnya dengan menyatakan bahwa mereka mencoba membantu ekonomi pasar melalui kelembagaan dan hukum. Selain itu, masyarakat Korea Selatan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya menangani krisis moneter di Asia tahun 1997. Saat krisis melanda, Kim Dae Jung juga turut meminta bantuan masyarakatnya menggalang kampanye untuk mencari dana dan meminjamkan harta yang mereka miliki untuk membangun kembali Korea Selatan dari krisis yang dialami saat itu. Maka dilihat dari strategi yang ditekankan oleh Kim Dae Jung tersebut berhasil, dikarenakan masyarakat menyerahkan segala yang mereka punya demi satu kesatuan kepentingan bersama. Semua penduduk Korea Selatan merasakan penderitaan yang sama dan dalam mengatasi hal tersebut, mereka bekerja sama dengan tulus dan mempercayakan segalanya kepada pemerintah (Widarjono, 2016). Oleh sebab itu, dari penerapan semua kebijakan dibawah kepemimpinan Kim Dae Jung, hasil akhirnya yaitu kemampuan dalam mengatasi krisis ekonomi tahun 1997 yang ditunjukkan dengan meningkatnya GDP dan GNP secara signifikan pada tahun 1999, serta mampu menstabilkan kembali perekonomian Korea Selatan. Sampai saat ini, Korea Selatan berhasil menjadi salah satu negara dengan ekonomi maju di kawasan Asia (NI'MAH & Winarno, 2007).

Sebelum krisis ekonomi terjadi tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1996, Korea Selatan dikategorikan sebagai negara maju dan menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan-OECD. Namun satu tahun kemudian, krisis moneter tahun 1997 tersebut yang melanda banyak perusahaan menjadi tidak memiliki kemampuan membayar hutang usaha, Hanbo Iron & Steel' menjadi bangkrut akibat obligasi yang tidak ada harganya sebesar 5 triliun 700 miliar won, terdapat korupsi yang melibatkan dunia politik dan keuangan. Akibat buruknya kinerja ekonomi Korea Selatan, para investor asing kehilangan minat pada pasar Korea Selatan dan meninggalkan pasar saham, sehingga harga saham kolaps serta nilai tukar mata uang won terhadap dolar Amerika juga ikut anjlok (KBS World Radio, 2015).

SIMPULAN

Negara bisa mengalami sebuah krisis ekonomi dikarenakan tidak adanya kemampuan untuk membayar beban utang luar negeri karena beban utang tersebut melebihi kemampuan membayar negara, adanya neraca pembayaran dengan jumlah yang besar dan kondisinya tidak terkontrol serta investasi yang tidak efisien. Krisis Ekonomi ini berdampak pada beberapa negara seperti halnya di Indonesia dan Korea Selatan. Pada saat krisis terjadi, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani krisis ekonomi yang terjadi, yaitu kebijakan untuk melakukan penghematan devisa, BI mengurangi pembelian dollar AS, proyek – proyek besar ditunda, dan suku bunga BI dinaikkan. Rencana tersebut membuat biaya modal semakin meningkat dan mahal, lalu Indonesia terpaksa mengandalkan bantuan dari IMF. Korea Selatan

saat krisis ekonomi tersebut, sedang dalam pemerintahan Kim Dae Jung mengambil kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1997 dengan merestrukturisasi kondisi ekonomi, Bantuan dana IMF, menggunakan dana dari *World Bank*. Kedua Pemimpin memiliki karakteristik masing – masing dengan berbagai keputusan dengan latar belakang yang menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyudha, R. (2020). *Mengenang Mei 1998: Krisis Moneter Pemicu Orde Baru Lengser*. <https://republika.co.id/berita/qa71r3282/mengenang-mei-1998-krisis-moneter-pemicu-orde-baru-lengser>
- CNN Indonesia. (2020). *Memahami Beda Resesi dan Krisis Ekonomi*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201104175037-532-565968/memahami-beda-resesi-dan-krisis-ekonomi>
- Cottam, M. L., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (2010). Cognition, Social Identity, Emotions, and Attitudes in Political Psychology. *Introduction to Political Psychology*, 76–126.
- Desmiza, D. (2015). Penerapan Peraturan Bank Indonesia no 16/20/Pbi/2014 tentang Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Sebagai Instrumen Manajemen Risiko dalam Kebijakan Utang Korporasi Nonbank. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 12(1), 17–41.
- Hidayati, V. P. (2015). *Pengaruh Karakteristik Pemimpin Korea Selatan Terhadap Implementasi Sunshine Policy Tahun 1998-2010*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Hudson, V. M., & Day, B. S. (2019). *Foreign policy analysis: classic and contemporary theory*. Rowman & Littlefield.
- Iriansyah, H. S. (2020). Krisis Asia, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan (Tinjauan Analisis Kapitalisme Korea Selatan). *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 12(1), 53–60.
- Kaloka, Y. N., Tegar, P., & Eldy, M. (2019). Strategi Korea Selatan dalam Pemulihan Krisis Moneter Tahun 1997 Melalui IMF. *Nation State Journal of International Studies*, 2(1), 44–56.
- KBS World Radio. (2015). *Meloncat dengan Mengatasi Krisis Ekonomi*. http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=i&menu_cate=history&id=&board_seq=3846&page=6&board_code=
- Kim, S., & Lee, G. (2011). When security met politics: desecuritization of North Korean threats by South Korea's Kim Dae-jung government. *International Relations of the Asia-Pacific*, 11(1), 25–55.
- Lindblad, J. T. (2015). Foreign direct investment in Indonesia: Fifty years of discourse. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(2), 217–237.
- MacIntyre, A. (2018). *7. Political Institutions and the Economic Crisis in Thailand and Indonesia*. Cornell University Press.
- Merdeka.com. (2020). *Profile Kim Dae Jung*. <https://m.merdeka.com/dae-jung-kim/profil/>
- Minardi, A. (2019). Kebangkitan Korea Selatan Pasca Krisis Ekonomi dan Kontribusinya Terhadap Indonesia. *Korean Studies In Indonesia*, 1(2), 12–18.
- Mintz, A., & DeRouen Jr, K. (2010). *Understanding foreign policy decision making*. Cambridge University Press.
- NI'MAH, U., & Winarno, B. (2007). *Kebijakan Kim Dae Jung dalam mengatasi krisis ekonomi 1997*. [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
- Pirie, I. (2012). A comparative analysis of the impact of the 1997 Asian crisis and the contemporary global economic crisis on the Korean political economy. *Contemporary Politics*, 18(4), 416–433.
- Rosenau, J. N. (2006). *The Study of World Politics: volume 1: theoretical and methodological challenges*. Routledge.

- Sari, P. K., & Fakhrudin, F. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 377–388.
- Shin, K.-Y. (2013). Economic crisis, neoliberal reforms, and the rise of precarious work in South Korea. *American Behavioral Scientist*, 57(3), 335–353.
- Siswosoemarto, R. (2013). *Intelijen Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Skeem, J. L., Polaschek, D. L. L., Patrick, C. J., & Lilienfeld, S. O. (2011). Psychopathic personality: Bridging the gap between scientific evidence and public policy. *Psychological Science in the Public Interest*, 12(3), 95–162.
- Stubbs, R. (2017). *Rethinking Asia's economic miracle: The political economy of war, prosperity and crisis*. Macmillan International Higher Education.
- Utami, A. T. (2018). Efisiensi Pasar Bentuk Lemah Pada Pasar Modal Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan Periode Krisis Ekonomi Global 2008. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 101–116.
- Widarjono, A. (2016). Evaluasi Kritis Kinerja IMF dalam Krisis Asia. *UNISIA*, 50, 343–352.